

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Di Melengkapi Tugas-Tugas Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

MERLIANA

1551030057

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah
(konsentrasi Akuntansi Syari'ah)**

Acc. munaqasah
Bandar Lampung, 16/10/2020



Any Eliza



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT)

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang di laksanakan secara periodik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal terpenting dalam sistem pertanggungjawaban. Laporan Keuangan disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai laporan keuangan yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efesiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Mengingat pentingnya sebuah laporan keuangan maka dari itu sangat penting pula mengetahui faktor faktor apasaja yang mampu mempengaruhi laporan keuangan tersebut. Dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti ialah sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data dianalisis dengan metode statistik. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara *self administered questionnaire* yaitu responden menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat peneliti. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah dilihat dari $F_{hitung} = 410.719$ dan $F_{tabel} = 2,7336$ (dari signifikansi 0.05 dan $df_1 = 3$ $df_2 = 71$) . Sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi / probabilitas $0.000 < 0.05$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan sehingga ada pengaruh Sumber daya manusia (X_1) dan Sistem Pengendalian Internal (X_2) dan Pengawasan Keuangan Daerah(X_3) secara simultan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) .

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Secara parsial Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan(2) Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan (3) Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

***Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya
Manusia, kualitas informasi laporan keuangan***

MOTTO

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan menjadi temannya setan,

dan setan itu telah kufur kepada tuhan nya. (Q.S. Al- Isra' ayat 27).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : **Merliana**
NPM : **1551030057**
Jurusan : **Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Nasruddin, M.Ag
NIP. 195809241990031003

Pembimbing II

Any Eliza, S.E., M.Ak.
NIP. 198308152006042004

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat)"** disusun oleh **MERLIANA, NPM: 1551030057, Jurusan Ekonomi Syaria'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua : **Syamsul Hilal, M.Ag**

Sekretaris : **Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I**

Penguji I : **Hanif, S.E., M.M**

Penguji II : **Dr. H. Nasruddin, M.A.g**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198008012003121001

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang di anugerahi dengan nama lengkap Merliana , dan lahir pada tanggl 19 Oktober 1997 di desa Gunung Tiga, Kecamatan Ulu-Belu, Kabupaten Tanggamus. Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SDN Negeri 1 Gunung Tiga , Kecamatan Ulu-Belu, Kabupaten Tanggamus, lulus pada tahun 2009.
2. MTS YPPTQMH, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu , lulus pada tahun 2012.
3. MA YPPTQMH, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2015.
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

PERSEMBAHAN

Dengan selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan rasulNya SAW, yang selalu memberi panduan hidup dan ridho-Nya. Maka penulisan skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah Casri dan Ibu Sri Anita yang saya hormati dan saya cintai, terimakasih atas setiap do'a, motivasi, kasih sayang yang selalu membangkitkan dan menguatkan di setiap langkahku menuntut ilmu sehingga skripsi ini selesai. Semoga selalu dalam ridho dan lindungan Allah SWT.
2. Kakak tercinta Riliana dan Adik tercinta Asraf Syaputra yang menjadi salah satu motivasi sukses untukku, agar menjadi motivasi adik kedepannya.
3. Saudara Asep Alfarid S.pd dan keluarga besarku tercinta yang selalu men-support dan mendo'akan kesuksesan dan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.
5. Bapak pembimbing yaitu Dr. M. Nasruddin, M.Ag dan Any Eliza, M.Ak yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi semangat hidup terutama untuk dunia perkuliahan.
6. Sahabat-sahabatku tercinta Heni Tiara, Gelista Dewintri, Regita Apriliani dan Yenita Fitriana. Kalian yang memberikan dukungan, bantuan dan do'a untukku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	12
F. Fokus Penelitian.....	12
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	15
1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	15
2. Kualitas Aparatur Daerah	19
3. Pengendalian Internal.....	21
4. Pengawasan Keuangan Daerah	24
B. Tinjauan Pustaka	26
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Hipotesis Penelitian	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data	37
C. Tempat Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian	43
F. Populasi dan Sampel.....	44
G. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Deskripsi Responden Penelitian.....	54
B. Analisis Data Hasil Penelitian	59
1. Sumber Daya Manusia	59
2. Sistem Pengendalian Internal	64
3. Pengawasan Laporan Keuangan.....	68
4. Kualitas Laporan Keuangan	72
C. Analisis Data	75
1. Uji Prasyarat Regresi Linier	75
2. Persamaan Regresi Linier Berganda	78
D. Pembahasan.....	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Tabulasi Hasil Penelitian

Lampiran 3 : Instrumen

Lampiran 4 : Hasil Uji Validasi

Lampiran 5 : Reliabilitas

Lampiran 6 : Uji Prasyarat

Lampiran 7 : Regresi Linier Berganda

Lampiran 8 : Tabulasi Validitas dan Reliabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Iu. 2013. Affected of Financial Management and Auditor Competence toward Corporate, Satisfaction and financial Performance. *Journal of Business Research*
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Adhi, dan Suhardjo. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tual)”. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 5, No. 3, Oktober
- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol.5. No.1.
- Anindita, Primastuti. 2006. Kualitas Sistem Pengendalian Intern Sebagai Penentu Tingkat Kepercayaan Laporan Keuangan Suatu Pemerintah Daerah. *Widyapraja*, Vol. 32, No. 3, Tahun 2006.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Bambang Hartadi, 1992. *Sistem Pengendalian Intern*. Yogyakarta: BPFE
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM
- Barry, Cushway. 2012. *Human Resource Mnagement*. Jakarta : PT.Elex Media
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-III* . Jakarta: Balai Pustaka
- Edy Sutrisno. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Pranada Media Group
- Eriva, C. Y., Islahuddin, & Darwanis. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(2), 1-14
- Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari. 2014. *Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)*. Seminar Nasional Dan Call For Paper. ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Gerry Armando, “Pengaruh Sistem Pendendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi).” Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana: 2005
- Imam, Ghozali .2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Pontianak : Simposium Nasional Akuntansi XI
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintah, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010), h.4.
- Israwaty Akhmad, Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA). ISBN 978-602-50710-6-5 Jakarta, 23 – 25 Maret 2018 KNAPPPTMA KE-7.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.7M.Nafarin. 2004. *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta
- Kreitner, R. dan A.Kinicki. 2008. *Organizational Behavior. 8th Edition*. Boston: MCGraw-Hill
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(1), 1-17.
- Mardiasmo. 2003. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Meycih, Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Melalui Penilaian Tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Dan Profitabilitas Pada PT. Kalbe Farma Tbk, *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 619-628
- Meyta Anggaraeni , I Gusti Ayu Purnamawati, Anantawikrama Tungga Atmadja. Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada 15 Dinas di SKPD Kabupaten Badung). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Kedua, BPFE: Yogyakarta
- Muhamad Rifandi, Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Relasi*, Vol. XIV, No. 02, Juli 2018
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Kedua, BPFE: Yogyakarta
- Muzahid, Mukhlisul, 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi*. Volume 9. No. 1, Hal 1-26.
- Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 135-137.

- Noviyanti, Suzy & Intiyas Utami. 2004. *Dasar-dasar Pengauditan*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Praytino , Peranan Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. X, *Jurnal EMBA* Vol. 1 No.3 September 2013, Hal. 619-628
- Paul Lillrank, “*The Quality of Information*” *Internasional Journal of Quality & Reliability Management*, Vol. 20 No 6 (Maret 2013) h. 691-703.
- Primayana, Hengki. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiksha.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Riana. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *TAR – Study & Accounting Research* | Vol XI, No. 1 – 2014
- Susilawati, Dwi Seftihani Nordiawan, D. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, U., dan Y. J. Pambelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis* ISSN : 0216–1249, Vol. 4, No. 1 : 14-33
- Susilo Martoyo. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia* , Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Siswanto.2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Setiawati, Erma dan Shinta Permata Sari. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi: Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karisedenan Surakarta. Seminar Nasional dan Call For Paper UMS 2 (6):401-444, ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sutrisno. Hadi,1991. *Analisa Butir untuk Instrument*. Edisi pertama. Yogyakarta, Andi Offset
- Suharsimi. Arikunto,2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Setiawati, Erma dan Shinta Permata Sari. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi: Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karisedenan Surakarta. Seminar Nasional dan Call For Paper UMS 2 (6):401-444, ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Susilawati, Dwi Seftihani Riana. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. TAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 2014
- Setiawati, Erma dan Shinta Permata Sari. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi: Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karisidenan Surakarta. Seminar Nasional dan Call For Paper UMS 2 (6):401-444, ISBN: 978-602-70429-2-6
- Tanjung, A. H. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual : Pendekatan Teknis Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Bandung : Alfabeta
- Tuti Herawati . Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). ISSN : 1693-4482
- Warren et al,2005. *Prinsip-Prinsip Akuntansi* . Jakarta : Salemba Empat
- Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi FE UNSIL, Vol. 4, No. 1, 2009. h.578

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) jurusan Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam beserta jajaran wakil Dekan I, II dan III yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S. E, M.S.I sebagai ketua jurusan Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr.H.Nasruddin,M.Ag dan Any Eliza,M.Ak selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan, nasehat, motivasi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi.

5. Ibu Takariwati, Bapak Ahmad Faisol Anshori, Ibu Ida Nirwana, Bapak Mairizal Dan Kak Aidil Selaku Pegawai Pada Bagian Keuangan Dan Perencanaan Di Rektorat UIN Raden Intan Lampung yan telah mendukung dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan Akuntansi Syari'ah C dan seluruh angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan semangat dalam kegiatan perkuliahan dan penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi di harapkan dapat memberi manfaat khususnya bidang Ekonomi Islam.

Bandar lampung, 5 MARET 2020

Penulis

Merliana

1551030057

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan judul skripsi ini **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat)”** maka terlebih dahulu perlu di jelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Faktor-faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²
3. Sumber Daya Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.³

¹ M.Nafarin, *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, h. 129

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.312

³ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta. Pranada Media Group, 2014, h.3

4. Sistem Pengendalian Internal adalah adalah semua rencana organisasional metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.⁴
5. Pengawasan Keuangan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar dalam bidang laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁵
6. Kualitas Informasi Laporan Keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Dalam penelitian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan atau lembaga pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang di peroleh dalam suatu periode.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut:

⁴ Bambang Hartadi, *Sistem Pengendalian Intern*. (Yogyakarta: BPFE, 1992). h. 37

⁵ Makmur. Efektivitas Kebijakan Pengawasan. (Bandung PT. Refika Aditama, 2011), h.176

⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.7

1. Alasan Objektif

Laporan keuangan merupakan hal terpenting dalam sistem pertanggungjawaban. Laporan Keuangan disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai laporan keuangan yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Mengingat pentingnya sebuah laporan keuangan maka dari itu sangat penting pula mengetahui faktor faktor apa saja yang mampu mempengaruhi laporan keuangan tersebut. Dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti ialah sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Alasan subjektif

Permasalahan yang dibahas skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang di pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia di perpustakaan ataupun sumber lainnya yang mendukung seperti jurnal, artikel dan data yang di perlukan.

C. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas

publik sebagai bentuk kewajiban memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang di laksanakan secara periodik.⁷ Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa laporan keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan di pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang di butuhkan oleh berbagai pihak.

Perspektif Islam menjelaskan pencatatan informasi laporan keuangan merupakan kegiatan muamalah yang mempunyai makna segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan hubungan antar sesama manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan dunia. Salah satu kegiatan muamalah ialah pencatatan keuangan atau yang sering disebut dengan Akuntansi. Dari sudut pemakai akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatankegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, pemerintah dan sebagainya. Sedangkan dari sudut proses kegiatan akuntansi

⁷ Mardiasmo. Perwujudan Tranparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2006. 2(1), 1-17.

adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.

Allah SWT telah mengatur pencatatan laporan keuangan dalam Q.S Al Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Islam selalu menekankan dalam kegiatan muamalah harus dilandasi dengan prinsip “tidak mendzalimi dan tidak terdzalimi” dan mencapai tujuan ekonomi yaitu terpenuhinya kebutuhan sehingga mencapai “fallah” Prinsip Akuntansi dalam Q.S. AlBaqarah ayat 282 menunjukkan bahwa praktek Akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini di klaim berasal dari Ilmuan Barat. Karakteristik pokok akuntansi adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Ayat diatas menjelaskan agar catatan transaksi harus dapat dipahami jika tidak dapat memahami dianjurkan untuk menunjukan orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang bagus terhadap keuangan. Selain itu dalam mencatat transaksi haruslah dengan benar agar laporan yang dihasilkan relevan, dan tidak ada konsep tidak material dalam transaksi utang-piutang, Baik kecil maupun besar haruslah tercatat dan diselesaikan sesuai jadwalnya.

Q. S. Al-Baqarah ayat 282 sebagai ayat terpanjang dalam Al-Quran yang membahas tentang pencatatan keuangan dalam melakukan muamalah

dapat dianalogikan bahwa kegiatan muamalah tidak kalah sakeralnya dengan ibadah, sebab muamalah mengakomodir ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta`ala. Q.S. Al-Baqarah ayat sebagai bentuk bimbingan dan nasihat Allah Subhanahu Wa Ta`ala kepada hamba-hambanya dalam hal melakukan Muamalah. Ilmu akuntansi merupakan ilmu yang penting dalam kegiatan muamalah dan menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta`ala. Konsep saksi dalam ayat ini dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang harus valid, dimana disetiap bukti transaksi haruslah jelas siapa maker, chacker, Approval, dll layaknya laporan keuangan. Berdasarkan ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ayat ini dapat di jadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi dan pengeluaran dalam laporan keuangan sesuai dengan posisinya.⁸

Sebagaimana yang diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintahan bahwa laporan keuangan berkualitas, salah satu kriterianya adalah harus disajikan secara andal. Andal disini artinya bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan secara jujur dan dapat diverifikasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten dalam bidangnya. kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai laporan

⁸ Septian Arief Budiman. Akuntansi Dan Al-Qur`An. Seminar Nasional I Universitas Pamulang Program Studi D3 Akuntansi Aula Rektorat, 13 Desember 2018 ISSN : 977 25993430 04

keuangan OPD yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efesiensi OPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Laporan keuangan OPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.⁹ 4 (empat) karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.¹⁰ Hal ini juga terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Muthaffifin (83) Ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang juga Dalam akuntansi syariah dilarang dalam berbuat curang. Kita mengenal beberapa kasus kecurangan

⁹ Nordiawan, D. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. (Jakarta: Salemba Empat 2010), h. 45

¹⁰ Tanjung, A. H. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua : Pendekatan Teknis Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 67

dalam akuntansi yang menyebabkan suatu perusahaan pailit, yang terkenal kasus enron. Termasuk praktek *earning management* dilarang dalam akuntansi syariah kecuali untuk mendatang *mashlahah* dan menghindari *mudharat*. Proses pelaporan keuangan harus dilaksanakan secara efisien, jujur dan adil serta relevan.

Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah saat ini lebih bersifat horizontal (pemerintah daerah bertanggungjawab kepada DPRD maupun pada masyarakat). Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat.¹¹ Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistik.¹²

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang merupakan perbaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tujuan di berlakukannya hal tersebut

¹¹ Mardiasmo. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003), h. 79

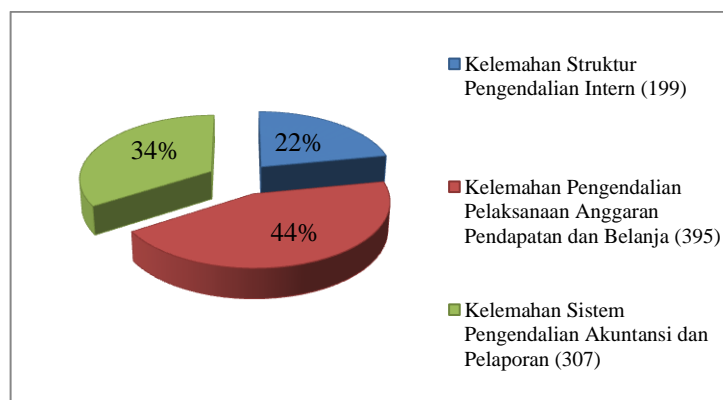
¹² Santoso, U., dan Y. J. Pambelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis* ISSN : 0216–1249, Vol. 4, No. 1 : 14-33.

adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan daerah hingga saat ini juga masih mengalami kendala dalam proses penyusunannya. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM (sumber daya manusia) pada masing-masing SKPD, dalam hal ini adalah aparatur daerah, kenyataannya, banyak pihak yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Hal tersebut menjadi kendala bagi pihak aparatur dalam menyampaikan laporan keuangan di karenakan pegawai belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang di hasilkan juga tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).¹³

Faktor lain yang mungkin juga berpengaruh ialah sistem pengendalian intern dimana Sistem Pengendalian Intern Hasil pemeriksaan BPK atas 85 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2018 mengungkapkan 901 kelemahan SPI. Kelemahan SPI tersebut terdiri atas: (1) 307 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (2) 395 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; serta (3) 199 kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada Gambar 1.2 berikut ini:

¹³ Eriva, C. Y., Islahuddin, & Darwanis. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(2), 1-14



Gambar 1.2 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018

Selain SPI dan Sumber Daya Manusia dalam menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah.¹⁴ Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.¹⁵

Kebijakan belanja Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat dan akurat. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan

¹⁴ Gerry Armando, "Pengaruh Sistem Pendendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)." Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. h. 3.

¹⁵ Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

daerah ini terkait dengan isu strategis Kabupaten Pesisir Barat yaitu kordinasi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah terkait, memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan sumber daya aparatur, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan harus dicapai secara efektif dan efisien dengan menetapkan skala prioritas, peningkatan fungsi sumber daya air harus dicapai secara efektif dan efisien, penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan dan mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan teknis pembangunan daerah.

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil rekapitulasi opini BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk laporan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Opini BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk laporan hasil
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**

No	Nama Kabupaten/ Kota	Opini				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Provinsi Lampung	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Lampung Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Lampung Selatan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Lampung Tengah	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
5	Kabupaten Lampung Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
6	Kabupaten Lampung Utara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Mesuji	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
8	Kabupaten Pesawaran	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Pesisir Barat	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
10	Kabupaten Pringsewu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Tanggamus	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
12	Kabupaten Tulang Bawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Bandar Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : <http://www.bpk.go.id>

- : Belum dibentuk
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP – DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
WDP : Wajar Dengan pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang di publikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi criteria karakteristik kualitatif laporan keuangannya seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematatan, ketidakefisienan, dan ketidak efektifan. Fakta dan fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan SKPD Kabupaten Pesisir Barat.

Selain karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat memperoleh laporan keuangan yaitu TMP dan WDP dari tahun 2014 hingga 2018 sehingga diindikasikan memiliki kajian masalah yang perlu untuk diteliti. Pemilihan objek penelitian ini juga dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah kabupaten pesisir barat tahun 2019.¹⁶ Dalam laporan keuangan tersebut masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal yaitu perihal penataan asset yang dinilai masih kurang memadai. Dalam hal pengelolaan keuangan masih terdapat hal yang dinilai masih kurang memadai. Dalam hal pengelolaan keuangan masih terdapat hal yang dinilai kurang patuh terhadap

¹⁶<https://pesisirbaratkab.go.id/berita/pesisir-barat-mendapat-predikat-opini-wajar-tanpa-pengecualian-atas-laporan-keuangan-tahun-2019> diakses 3 Desember 2020

peraturan perundang-undangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Guna menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik.¹⁷ Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka di penelitian selanjutnya peneliti mencoba untuk mengujin kembali **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat).**

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian pembahasan dalam skripsi ini maka penulis memberikan batasan yakni :

1. Variabel yang diteliti hanya Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah
2. Penelitian dilakukan di Pesisir Barat sebagai analisis faktor yang mampu mempengaruhi kualitas keuangan daerah dalam mengatasi permasalahan dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Barat

¹⁷ Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta : Andi. 2004),
h. 35

E. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat?
2. Apakah kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat?
3. Bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam konsep kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?

F. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas Untuk memfokuskan kajian pembahasan dalam skripsi ini maka penulis memberikan fokus penelitian yakni penelitian dilakukan dengan studi kuantitatif dalam menganalisa faktor faktor yang mempengaruhi laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yakni faktor SDM, Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan oleh Lembaga Berwenang.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat.
- b. kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat
- c. Mengetahui perspektif ekonomi Islam dalam konsep kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sesuai dengan berkaitannya dengan judul yang di teliti, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengemban ilmu khususnya akuntansi syariah khususnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat .

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk mngembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh peneliti,

memberi tambahan informasi bagi calon peneliti sebagai peneliti sebagai referensi dalam melakukan peneliti utamanya di bidang akuntansi dengan kajian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Manfaat Pemerintah Daerah Pesisir Barat

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor faktor yang mampu mempengaruhi kualitas keuangan daerah. SKPD Pesisir Barat belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat memperoleh laporan keuangan yaitu TMP dan WDP sehingga diindikasikan memiliki kajian masalah yang perlu untuk diteliti. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat memperoleh laporan keuangan yaitu TMP dan WDP sehingga dapat memberikan gambaran mengenai solusi dari permasalahan tersebut.

BAB 11

LANDASAN TEORI

H. Kajian Teori

Sebelum peneliti masuk lebih dalam tentang penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini agar tidak ada kesalahpahaman dalam pengertian di dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat di gunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut, laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang di lakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat di katakan sebagai data juga dapat di katakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau di ubah kealam konteks yang memberikan makna.¹

Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah.² Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan

¹ Paul Lillrank, "The Quality of Information" *Internasional Journal of Quality & Reliability Management*, Vol. 20 No 6 (Maret 2013) h. 691-703.

² Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Pontianak : Simposium Nasional Akuntansi XI

di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, asumsi dasar tersebut meliputi asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang. Pelaporan keuangan sektor publik juga disusun atas dasar prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.³

Berkaitan dengan entitas pelaporan ketentuan terdahulu terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah dalam menentukan entitas pelaporan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 96-100 menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah terdiri atas 2 (dua) tahapan. Tahap pertama yaitu penyusunan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. PP 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

³ Salamun, Suyono.. Analisis Laporan Keuangan Daerah. 2007. <http://www.google.com>.

⁴ Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 56

Penyajian Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah (Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003). Tidak dapat terbantahkan lagi jika yang paling bertanggungjawab atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah Gubernur/Bupati/Walikota. Namun, perlu untuk dipahami bahwa LKPD merupakan *output* dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD, sehingga untuk menguraikan secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD, tidak dapat hanya dengan menganalisis laporan hasil pemeriksaan BPK saja, namun juga perlu untuk melakukan studi yang mendalam atas seluruh regulasi, kebijakan, rangkaian prosedur, peralatan (fasilitas) dan penyelenggara pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Malahan jika diperlukan dan dimungkinkan sampai kepada menilai sejauhmana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, karena walaupun peraturan perundang-undangan telah memberikan wewenang ataupun hak penuh kepada BPK untuk menentukan opini atas penyajian LKPD, tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga sangat dipengaruhi oleh komitmen, kemampuan, kompetensi dan etika seorang auditor BPK yang tentunya dapat pula dipertanyakan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik indikator berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki ialah:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap yakni Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian Jujur
- 2) Dapat Diverifikasi (verifiability)
- 3) Netralitas

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

2. Kualitas Aparatur Daerah

Aparatur daerah juga diartikan sebagai Sumber Daya Manusia yang ada pada bidang Pemerintahan. Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.⁵ Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM).⁶

⁵ Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE, 2007), h. 67

⁶ Adhi, dan Suhardjo. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tual)". Jurnal STIE Semarang. Vol. 5, No. 3, Oktober.

Menilai kualitas aparatur dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat tanggungjawabnya dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.⁷ PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.⁸

Adapun faktor-faktor yang menunjang kompetensi sumber daya manusia, sebagai berikut:

a) Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan

⁷ Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari. 2014. *Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)*. Seminar Nasional Dan Call For Paper. ISBN: 978-602-70429-2-6.

⁸ Adhi, dan Suhardjo. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang. Vol. 5, No. 3, Oktober.

tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan.

b) Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.

c) Pengalaman Kerja

pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota daripada organisasi di mana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi.

3. Pengendalian Internal

Setiap Organisasi mempunyai tujuan. Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi tsb diperlukan pengendalian intern. Dalam Organisasi pemerintah pengendalian intern ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Di dalam SPIP pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui: 1) Kegiatan yang efektif dan efisien, 2) pengamanan aset negara, 3) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta 4) keandalan pelaporan keuangan.

Tujuan keandalan pelaporan, khususnya pelaporan keuangan, meliputi pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan dalam Organisasi Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang utama, harus disajikan secara andal agar dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal ini pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, setiap pimpinan dan seluruh pejabat/ pegawai di lingkungan K/L dan BUN perlu meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Dilihat dari tujuannya, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Pengendalian internal akuntansi, dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

- b) Pengendalian administratif, dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Tujuan pengendalian internal dapat dicapai jika manajemen menerapkan komponen-komponen pengendalian intern dari setiap aktivitas operasi. Statement of Auditing Standard (SAS) sejalan dengan PP No.60/2008 dalam mendefinisikan lima komponen pengendalian internal yang berkaitan dengan pernyataan COSO (1992).

Lima komponen pengendalian internal tersebut yaitu:

- a) Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi atau dasar bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.

- b) Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Penilaian risiko merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

- c) Aktivitas pengendalian (*Control activities*)

Aktifitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif.

d) Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional.

e) Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian internal, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai

berikut; pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan preventif, dan pengawasan represif.⁹

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Pengawasan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat.

⁹ Arfianti, Dita. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

- a) Pengaturan dan penetapan
- b) Perencanaan dan penganggaran
- c) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- d) Pertanggungjawaban keuangan daerah
- e) Pendapatan dan belanja daerah.

Praktek pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara internal dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan keuangan daerah oleh BPK dilakukan melalui pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E UUD 1945.

Secara umum terdapat Sembilan karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif, yaitu¹⁰:

- (1) Akurat (*Accurate*)
- (2) Tepat waktu (*Timely*)
- (3) Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)

¹⁰ Siswanto. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 149

- (4) Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*)
- (5) Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)
- (6) Secara organisasi realistis (*Organizationally realistic*)
- (7) Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*)
- (8) Fleksibel (*Flexible*)
- (9) Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)
- (10) Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*)

I. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Xu, et al. (2003) meneliti faktor kunci dari kualitas informasi akuntansi studi kasus di Australia. Hasil penelitiannya menyatakan Sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis menentukan kualitas informasi akuntansi.
2. Choirunisah (2008) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang di hasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang. Hasil penelitiannya menyatakan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.

3. Meyciah dengan judul analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan melalui penilaian tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas pada PT. Kalbe Farma Tbk. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan perusahaan, dapat di simpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik.¹¹
4. Nugraha dan Susanti (2010) meneliti penelitian pengaruh sistem pengendalian internal terhadap reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.
5. Praytino meneliti peranan analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan studi kasus pada PT X. dari hasil penelitian ini kinerja keuangan perusahaan menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya serta pengeluaran keuangan hal ini menyebabkan terjadinya fluktuasi pada pos-pos laba rugi mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya, dan di imbangi oleh naiknya biaya produksi, untuk laba bersih sebelum pajak mengalami penurunan dari tahun 2 ke tahun 1, sedangkan untuk tahun 3 terjadi kenaikan di bandingkan dengan tahun sebelumnya.¹²

J. Kerangka pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan penelitian yang sejenis yang telah dikemukakan diatas, maka variabel terkait dalam

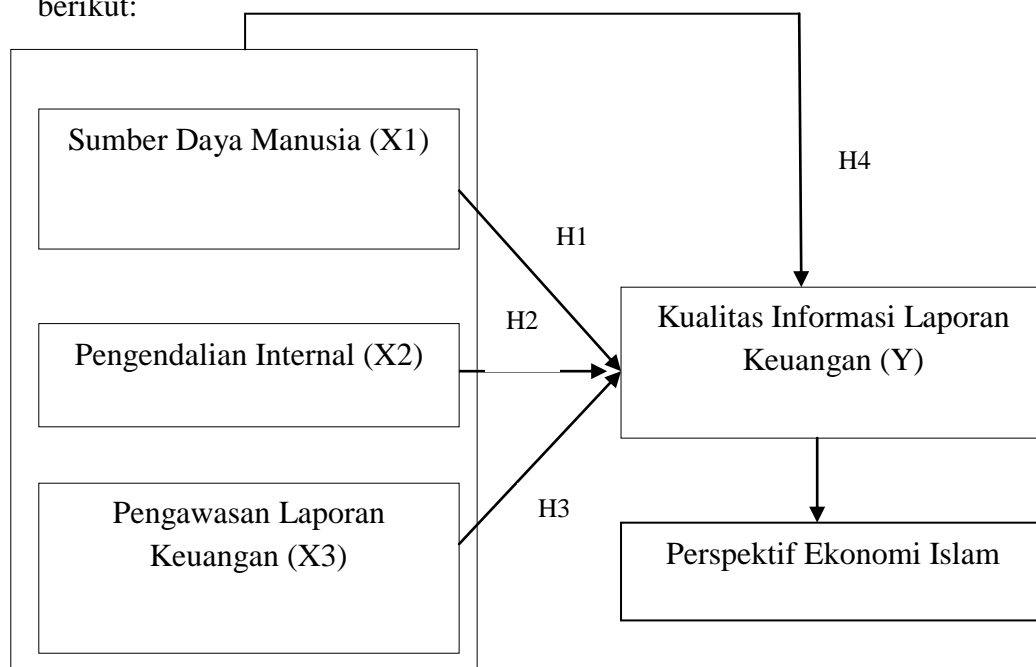
¹¹ Meyciah, Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Melalui Penilaian Tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Dan Profitabilitas Pada PT. Kalbe Farma Tbk, *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 619-628

¹² Praytino , Peranan Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. X, *Jurnal EMBA* Vol. 1 No.3 September 2013, Hal. 619-628

penelitian ini dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas selanjutnya dapat disusun kerangka berpikir yang menghasilkan suatu hipotesis. Dimana kerangka berpikir mempunyai arti suatu pola pemikiran peneliti dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Didalam penelitian ini terdiri dari variable bebas x_1 yaitu Sumber daya manusia dan x_2 adalah pengendalian internal dan x_3 adalah Pengawasan Laporan Keuangan dan y yaitu kualitas laporan keuangan..

Peneliti menuangkan ide atau jalan pemikiran dalam sebuah pemikiran penelitian didalam sebuah kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran

Dengan keterangan sebagai berikut :

X_1 : Varibel Bebas (SDM)

- X_2 : Varibel Bebas (Pengendalian Internal)
- X_3 : Varibel Bebas (Pengawasan Keuangan)
- Y : Variabel Terikat (Kualitas Informasi Laporan Keuangan)

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala.

1) Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan bukti terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara persial kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah ternyata mampu di antisipasi oleh pemerintah daerah terutama di pemerintah daerah kabupaten pesisir barat. Kemampuan ini terjadi karena sumber daya manusia telah siap untuk mendukung pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan memahami perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual, yang

secara langsung akan berkaitan dengan teknis operasional penatausahaan keuangan daerah maupun teknis akuntansinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriani yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dimana keterandalan merupakan salah satu faktor terciptanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.¹³ Begitu pula dengan penelitian Setiawati dan Shinta yang juga memberikan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Kualitas SDM tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
- H_1 : Kualitas SDM berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

2) Pengaruh Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan bukti terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti sistem pengendalian intern berpengaruh secara

¹³ Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol.5. No.1.

¹⁴ Setiawati, Erma dan Shinta Permata Sari. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi: Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karisedenan Surakarta. Seminar Nasional dan Call For Paper UMS 2 (6):401-444, ISBN: 978-602-70429-2-6.

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dinas-dinas di kabupaten pesisir barat dituntut untuk meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya

Sistem pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan /ketidak akuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang di peroleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.¹⁵ Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen .¹⁶ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitaian Susilawati dan Dwi bahwa istem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 74.6%. Hal yang paling berpengaruh dalam peningkatkan sistem pengendalian internal yaitu keandalan pelaporan. Tujuan pengendalian intern yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini. ¹⁷ Setiawati dan Shinta¹⁸ serta Indriasari dan Nahartyo¹⁹,

¹⁵ Noviyanti, Suzy & Intiyas Utami. *Dasar-dasar Pengauditan*. (Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. 2004), h. 56

¹⁶ Mulyadi. 2005. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Kedua, BPFE: Yogyakarta

¹⁷ Susilawati, Dwi Seftihani Riana. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *TAR – Study & Accounting Research* | Vol XI, No. 1 - 2014

¹⁸ Setiawati, Erma dan Shinta Permata Sari. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi: Studi Empiris Pada Pemerintah

akan tetapi penelitian ini menggunakan keseluruhan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pengendalian Internal tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

H_2 : Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

3) Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan bukti terdapat pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dinas-dinas di kabupaten pesisir barat dituntut untuk meningkatkan pengawasan keuangan di lingkungan kerjanya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rifandi²⁰ hasil penelitian mengungkapkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pengawasan

Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karisedenan Surakarta. Seminar Nasional dan Call For Paper UMS 2 (6):401-444, ISBN: 978-602-70429-2-6

¹⁹ Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo (2008), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Simposium Nasional Akuntansi, XII, Pontianak.

²⁰ Muhamad Rifandi, Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal Relasi, Vol. XIV, No. 02, Juli 2018

keuangan daerah diprioritaskan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan. Hal ini sama halnya dengan penelitian oleh Israwaty Akhmad, Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan²¹ bahwa Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kab Enrekang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Agar Laporan Keuangan punya kualitas yang bagus maka pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang perihal pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporannya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pengawasan Keuangan Tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

H_3 : Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

4) Kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. dalam Nogi bahwa asset organisasi yang paling penting dan harus

²¹ Israwaty Akhmad, Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA). ISBN 978-602-50710-6-5 Jakarta, 23 – 25 Maret 2018 KNAPPPTMA KE-7.

diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau human resource). Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi.²²

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et al salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).²³

Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah

²² Hessel, Nogi. *Manajemen Publik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana: 2005), h. 189

²³ Warren et al, *Prinsip-Prinsip Akuntansi* (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h 78

daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.²⁴ Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat

H_4 : Kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat.

²⁴ Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

